

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

KPKNL PADANG

TAHUN 2020

Jl.Perintis Kemerdekaan No.79, Padang Timur - Kota Padang, Sumatera Barat

Telp. (0751) 28299 Fax. (0751) 21306



LAPORAN KINERJA

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PADANG

TAHUN ANGGARAN 2020



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

KANTOR WILAYAH RIAU, SUMATERA BARAT, DAN KEPULAUAN RIAU

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PADANG

TAHUN ANGGARAN 2020

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Pengantar	ii
Ikhtisar Eksekutif	iv
Bab I Pendahuluan	1
Latar Belakang	1
Tugas, Fungsi, Dan Struktur Organisasi	2
Isu Strategis Organisasi	5
Sistematika Laporan	8
Bab II Perencanaan Kinerja	10
Rencana Strategis	10
Perjanjian Kinerja	11
Pengukuran Kinerja	13
Perkembangan Implementasi Pengelolaan Kinerja	13
Addendum Kinerja	14
Bab III Akuntabilitas Kinerja	16
Capaian Kinerja Organisasi	16
Kinerja Lainnya	30
Analisis Atas Pelaksanaan Rencana Aksi Atau Mitigasi Risiko	32
Rencana Aksi Atau Mitigasi Risiko Untuk Tahun 2021	32
Realisasi Anggaran	33
Bab IV Penutup	37
Lampiran	38

PENGANTAR

Budaya *good governance* dalam penyelenggaraan negara, dengan didasari semangat kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, dan akuntabilitas, diharapkan terinternalisasi ke dalam seluruh punggawa Kementerian Keuangan Republik Indonesia terutama pegawai Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padang sebagai bentuk totalitas pengabdian kepada masyarakat. Menindaklanjuti urgensi penerapan asas *good governance* tersebut dalam penyelenggaraan negara, pemerintah mengesahkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagaimana termaktub dalam Pasal 2 yang menyatakan bahwa setiap entitas pelaporan wajib menyusun laporan kinerja dalam rangka pertanggungjawaban APBD/ APBN.


Dengan berakhirnya Tahun 2019, dan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Review atas Laporan Kinerja, maka setiap instansi pemerintahan diwajibkan untuk menyusun laporan kinerja sebagai pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/ sasaran strategis instansi.

Hal tersebut mendasari penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) KPKNL Padang Tahun 2020 ini. LAKIN ini merupakan suatu bentuk akuntabilitas KPKNL Padang kepada masyarakat atas segala pelayanan yang disediakan, yang menitikberatkan pada pencapaian kinerja yang tertuang ke dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) KPKNL Padang Tahun 2020. Penilaian kinerja KPKNL Padang telah menggunakan sistem *balance scorecard* (BSC) yang dinilai berdasarkan pencapaian IKU yang mewakili keberhasilan KPKNL Padang dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan sesuai dengan kontrak kinerja KPKNL Padang dengan Menteri Keuangan.

Kami berharap dengan telah disusunnya LAKIN KPKNL Padang Tahun 2020, ini dapat memberikan gambaran kepada masyarakat akan visi, misi, program, dan kegiatan yang diselenggarakan oleh KPKNL Padang. Dengan *full disclosure* pada sasaran strategis dan IKU KPKNL Padang, dan dengan mengingat hakikat KPKNL Padang selaku instansi penyedia layanan publik, diharapkan tercipta suatu kontrol sosial atas kinerja KPKNL Padang yang pada akhirnya bermuara kepada peningkatan kinerja dan

performa serta pelayanan yang dapat kami berikan kepada masyarakat luas. Dengan dilandasi Nilai-nilai Kementerian Keuangan yang menjunjung tinggi Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, dan Kesempurnaan, serta dengan didorong oleh semangat *One Team, One Spirit, One goal*, KPKNL Padang selalu melakukan *continuous improvement* demi memberikan pelayanan yang terbaik kepada publik.

Sebagai penutup, kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mencurahkan tenaga dan pikirannya ke dalam penyusunan LAKIN KPKNL Padang Tahun 2020 ini. Kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua.

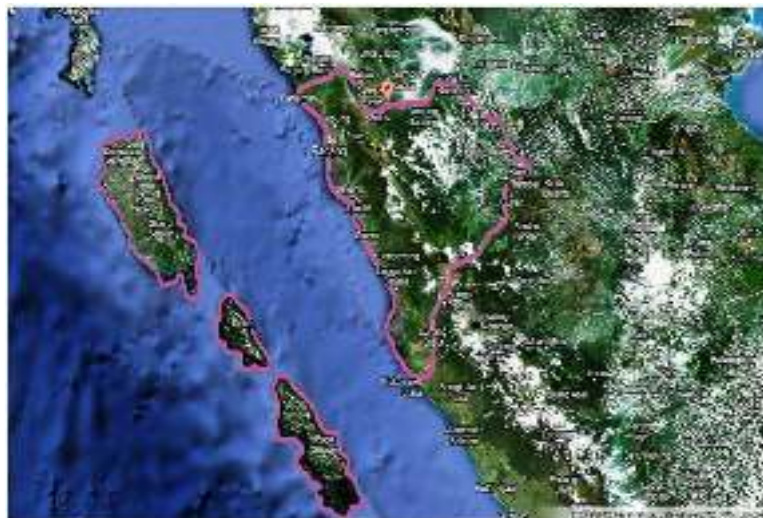
Kepala KPKNL Padang,

Edy Suyanto
NIP 196507121993031001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 135/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. KPKNL Padang memiliki tugas dan fungsi yang merupakan perluasan fungsional dari instansi yang sebelumnya dikenal dengan Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang (KP2LN) Padang, sebagai konsekuensi dari reorganisasi di lingkungan Departemen Keuangan sesuai Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 berikut perubahannya dan Keputusan Presiden Nomor 95 tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal di Lingkungan Departemen Keuangan.

KPKNL Padang merupakan kantor daerah yang merupakan instansi vertikal di bawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, yang berada dibawah bimbingan Kantor Wilayah DJKN Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau. KPKNL Padang berkedudukan di kota Padang, tepatnya di Jalan Perintis Kemerdekaan No. 79 yang wilayah kerjanya mencakup 11 kota/kabupaten disekitarnya. Kota/Kabupaten tersebut yaitu: Kota Padang, Kota Pariaman, Kota Solok, Kota Sawahlunto, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Pesisir Selatan dan Kabupaten Kepulauan Mentawai.

GAMBAR 1
Wilayah Kerja KPKNL Padang



LAKIN 2019 ini disusun untuk menyediakan informasi kepada masyarakat terkait kinerja KPKNL Padang sekaligus memenuhi asas akuntabilitas dalam suatu penyelenggaraan negara yang baik. LAKIN berfungsi sebagai tolak ukur kinerja secara kuantitatif serta menyediakan peran kontrol sosial akan kinerja KPKNL Padang. Penyusunan LAKIN 2020 ini didasarkan pada Rencana Strategis 2020-2024 serta kontrak kinerja KPKNL Padang yang telah mencakup penilaian kinerja serta capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2020. Dengan demikian, diharapkan masyarakat dapat turut mengawasi dan memonitor kinerja KPKNL Padang.

Sebagai salah satu instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, KPKNL Padang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang. Dalam melaksanakan tugasnya, KPKNL Padang memiliki fungsi:

1. inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, pengamanan kekayaan negara;
2. registrasi, verifikasi dan analisis pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara;
3. registrasi penerimaan berkas, penetapan, penagihan, pengelolaan barang jaminan, eksekusi, pemeriksaan harta kekayaan milik penanggung hutang/penjamin hutang;
4. penyiapan bahan pertimbangan atas permohonan keringanan jangka waktu dan/atau jumlah hutang, usul pencegahan dan penyanderaan penanggung hutang dan/atau penjamin hutang, serta penyiapan data usul penghapusan piutang negara;
5. pelaksanaan pelayanan penilaian;
6. pelaksanaan pelayanan lelang;
7. penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang;
8. pelaksanaan penetapan dan penagihan piutang negara serta pemeriksaan kemampuan penanggung hutang atau penjamin hutang dan eksekusi barang jaminan;
9. pelaksanaan pemeriksaan barang jaminan milik penanggung hutang atau penjamin hutang serta harta kekayaan lain;
10. pelaksanaan bimbingan kepada Pejabat Lelang;
11. inventarisasi, pengamanan, dan pendayagunaan barang jaminan;

12. pelaksanaan pemberian pertimbangan dan bantuan hukum pengurusan piutang negara dan lelang;
13. verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang;
14. Pelaksanaan administrasi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.

Sejalan dengan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Keuangan, serta sesuai dengan visi dan misi KPKNL Padang, telah dirumuskan sasaran strategis yang kemudian dirinci secara mendetil ke dalam Indikator Kinerja Utama (IKU). Sasaran strategis dan IKU tertuang secara kuantitatif di dalam kontrak kinerja yang memudahkan proses penilaian. Penilaian terhadap IKU dilakukan secara sistematis melalui *e-performance* yang pada akhirnya menunjukkan capaian kinerja KPKNL Padang.

Adapun sasaran strategis KPKNL Padang Tahun 2020 adalah:

1. Pengelolaan kekayaan negara yang optimal,

Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang, tertuang dalam IKU pada tahun 2020, KPKNL Padang ditargetkan memperoleh persentase 100%, pada akhir tahun anggaran KPKNL Padang memperoleh 113,95% dari target yang telah ditetapkan. Hal ini diperoleh dari kerjasama antar pejabat dan pegawai KPKNL Padang dan *stakeholder* terkait.

2. Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien,

tertuang dalam IKU Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL. Pada tahun 2020, KPKNL Padang ditargetkan memperoleh indeks kepuasan pengguna layanan minimal sebesar 4,40 (skala 5) dan pada akhir tahun anggaran KPKNL Padang memperoleh indeks kepuasan pengguna layanan sebesar 4,85. Hal ini tidak terlepas dari koordinasi dan sinergi yang berkesinambungan dengan satuan kerja yang berada di wilayah kerja KPKNL Padang, baik secara *face to face* atau penggunaan sarana “TKTPKN – Tim Keliling Terpadu Pelayanan Kekayaan Negara” langsung ke lapangan. *Continuous improvement* yang terus menerus dilakukan oleh seluruh pegawai KPKNL Padang diharapkan dapat selalu memenuhi harapan pengguna layanan KPKNL Padang.

3. Pengelolaan lelang yang optimal,

tertuang dalam IKU Persentase hasil lelang (Pokok Lelang) baik dari Pejabat Lelang Kelas I maupun Pegadaian. Di tahun 2020, KPKNL Padang mendapat IKU merah

sebesar 49,49% dimana realisasi yang dicapai adalah Rp.49.320.009.381 dari target yang diberikan Rp.99.650.000.000.

4. Manajemen pelayanan yang berkualitas,

tertuang dalam IKU Rata-rata indeks ketepatan waktu penyelesaian layanan kekayaan negara dan lelang, merupakan ekspektasi DJKN terhadap pengguna layanan agar patuh terhadap berbagai peraturan dan kebijakan yang ditetapkan baik dalam pengelolaan kekayaan negara, piutang negara, dan lelang. Capaian IKU Indeks ketepatan waktu penyampaian laporan wasdal secara lengkap dan tepat waktu di akhir tahun 2020 sebesar 98,39 dari target yang ditetapkan sebesar 90.

5. Tata kelola kekayaan Negara yang efektif,

tertuang dalam 4 (empat) IKU yaitu:

1. Persentase bidang tanah BMN yang disertipikatkan dengan hasil capaian adalah 120%
2. Persentase efektivitas penyelesaian BKN dengan hasil capaian adalah 120%
3. Persentase nilai kekayaan Negara yang diutilisasi, dengan target yang diberikan Rp.8.994.933.000.000 dan realisasi yang dicapai adalah Rp.9.918.426.932.291
4. Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (Portofolio Aset), dengan capaian akhir adalah 100%

6. Penilaian yang berkualitas,

tertuang dalam IKU deviasi ketergunaan hasil penilaian dengan target awal yang diberikan adalah 34% dan hasil realisasi adalah 120%.

7. Tata kelola lelang yang efektif,

tertuang dalam 2 (dua) IKU yaitu :

1. Persentase produktivitas lelang, dengan hasil yang dicapai adalah 120% dari target yang diberikan adalah 34%
2. Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction, dengan hasil capaian adalah 111,11%.

8. Edukasi yang efektif,

sasaran strategis ini diwakili oleh tingkat efektifitas edukasi dan komunikasi yang pada tahun anggaran 2020, ditetapkan sebesar 90. KPKNL Padang berhasil membukukan capaian 92,5 dari target. Persentase capaian tersebut sebesar 103%. Prestasi ini berkat usaha KPKNL Padang dalam mengedukasi pengguna jasa terkait

current issue di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang melalui sosialisasi maupun konsultasi di area pelayanan kantor dan melalui media komunikasi lainnya seperti stasiun radio lokal dan media sosial resmi KPKNL Padang.

9. Pengawasan dan pengendalian yang efektif,

sasaran strategis ini memiliki IKU Persentase tindak lanjut pengelolaan aset mencapai 120% dari target yang ditetapkan sebesar 70% dan IKU Persentase tindak lanjut penyelesaian/perbaikan atas sisa aset objek penilaian kembali BMN, dengan hasil realisasi adalah 100%.

10. SDM yang kompeten,

sasaran strategis ini diidentifikasi oleh IKU Persentase pengembangan kompetensi pegawai baik *hard competency* maupun *soft competency*, dimana pada akhir tahun anggaran tercapai realisasi sebesar 120 % dari target yang ditetapkan sebesar 100%.

11. Organisasi yang *fit-for-purpose*,

tertuang dalam 3 (tiga) IKU yaitu :

1. Nilai Pemenuhan Unit Kerja terhadap kriteria ZI menuju WBBM, hasil yang diperoleh KPKNL Padang 82,09 dari 85 yang ditargetkan
2. Nilai hasil review pengelolaan kinerja berbasis BSC, hasil yang dicapai adalah 70 dari target yang diberikan adalah 70
3. Indeks efektivitas penyelenggaraan FGD Kode Etik Pegawai, hasil realisasi yang dicapai adalah 97,96 dari target yang diberikan adalah 80.

12. Pengelolaan BMN dan keuangan yang optimal

sasaran strategis ini diidentifikasi dengan Persentase kualitas pelaksanaan anggaran. Pada tahun 2020, realisasinya adalah sebesar 96% dari target yang ditetapkan sebesar 95%.

Sepenuhnya kami sadari bahwa dalam pencapaian kinerja 2020, KPKNL Padang masih memiliki banyak kekurangan, namun dengan sepenuh hati kami senantiasa berupaya dalam melakukan perbaikan dan penyempurnaan baik dari segi kebijakan, standar prosedur operasi, maupun dalam pelaksanaan teknis di lapangan sehingga pencapaian target kinerja pada tahun berikutnya dapat tercapai secara optimal.

BAB I PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 135/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. KPKNL Padang memiliki tugas dan fungsi yang merupakan perluasan fungsional dari instansi yang sebelumnya dikenal dengan Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang (KP2LN) Padang, sebagai konsekuensi dari reorganisasi di lingkungan Departemen Keuangan sesuai Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 berikut perubahannya dan Keputusan Presiden Nomor 95 tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal di Lingkungan Departemen Keuangan.

Budaya *good governance* dalam penyelenggaraan negara, dengan didasari semangat kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, dan akuntabilitas, diharapkan terinternalisasi ke dalam seluruh punggawa Kementerian Keuangan Republik Indonesia terutama pegawai Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padang sebagai bentuk totalitas pengabdian kepada masyarakat. Menindaklanjuti urgensi penerapan asas *good governance* tersebut dalam penyelenggaraan negara, pemerintah mengesahkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagaimana termaktub dalam Pasal 2 yang menyatakan bahwa setiap entitas pelaporan wajib menyusun laporan kinerja dalam rangka pertanggungjawaban APBD/ APBN.

Dengan berakhirnya Tahun 2018, dan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Review atas Laporan Kinerja, maka setiap instansi pemerintahan diwajibkan untuk menyusun laporan kinerja sebagai pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/ sasaran strategis instansi.

TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

KPKNL Padang merupakan unit eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan yang berada di wilayah kerja Kantor Wilayah DJKN Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, KPKNL Padang memiliki tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang dengan fungsi yang meliputi:

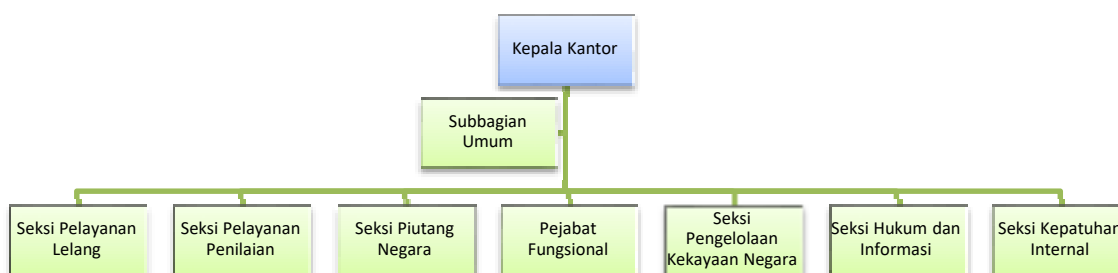
- a. inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, pengamanan kekayaan negara;
- b. registrasi, verifikasi dan analisis pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara;
- c. registrasi penerimaan berkas, penetapan, penagihan, pengelolaan barang jaminan, eksekusi, pemeriksaan harta kekayaan milik penanggung hutang/penjamin hutang;
- d. penyiapan bahan pertimbangan atas permohonan keringanan jangka waktu dan/atau jumlah hutang, usul pencegahan dan penyanderaan penanggung hutang dan/atau penjamin hutang, serta penyiapan data usul penghapusan piutang negara;
- e. pelaksanaan pelayanan penilaian;
- f. pelaksanaan pelayanan lelang;
- g. penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang;
- h. pelaksanaan penetapan dan penagihan piutang negara serta pemeriksaan kemampuan penanggung hutang atau penjamin hutang dan eksekusi barang jaminan;
- i. pelaksanaan pemeriksaan barang jaminan milik penanggung hutang atau penjamin hutang serta harta kekayaan lain;
- j. pelaksanaan bimbingan kepada Pejabat Lelang;
- k. inventarisasi, pengamanan, dan pendayagunaan barang jaminan;
- l. pelaksanaan pemberian pertimbangan dan bantuan hukum pengurusan piutang negara dan lelang;
- m. verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang;
- n. pelaksanaan administrasi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.

KPKNL Padang dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang membawahi 7 unit eselon IV yang terdiri dari:

- a. Subbagian Umum;
- b. Seksi Pelayanan Lelang;
- c. Seksi Pelayanan Penilaian;
- d. Seksi Piutang Negara;
- e. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara;
- f. Seksi Hukum dan Informasi;
- g. Seksi Kepatuhan Internal.

Sementara Struktur Organisasi KPKNL Padang dapat dilihat pada Gambar 1 di bawah ini:

GAMBAR 2
Bagan Organisasi KPKNL Padang



Sumber Daya Manusia sangat berpengaruh dalam pencapaian suatu tujuan dan sasaran, pelaksanaan kegiatan didukung oleh Sumber Daya Manusia yang ada di KPKNL Padang, berdasarkan Data per-31 Desember 2020 jumlah pegawai KPKNL Padang adalah 32 orang, dengan komposisi sebagai berikut :

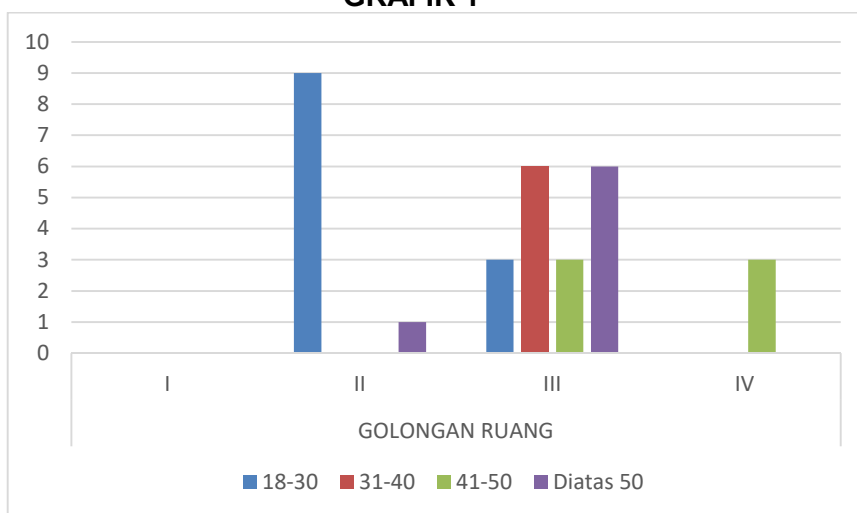
- a. Berdasarkan Umur dan Golongan

Komposisi pegawai KPKNL Padang menunjukkan bahwa dalam waktu dekat, KPKNL Padang akan kehilangan banyak pegawai karena pensiun (usia diatas 50 tahun sejumlah 8 orang). Sedangkan untuk pegawai berusia di bawah 30 tahun berjumlah 12 orang, pegawai usia 31-40 tahun berjumlah 6 orang dan pegawai dengan rentang usia 41-50 tahun berjumlah 6 orang.

TABEL 1

UMUR	GOLONGAN RUANG				JUMLAH
	I	II	III	IV	
18-30	0	9	3	0	12
31-40	0	0	6	0	6
41-50	0	0	3	3	6
Diatas 50	0	1	6	0	8
TOTAL	0	10	18	4	32

GRAFIK 1



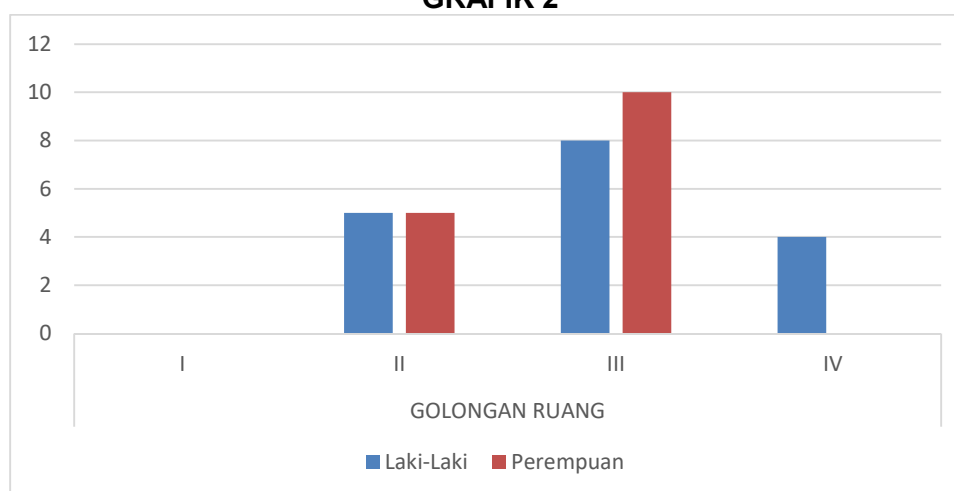
b. Berdasarkan Jenis Kelamin dan Golongan

Komposisi pegawai berdasarkan jenis kelamin dan golongan. Terlihat bahwa pegawai KPKNL Padang mayoritas berjenis kelamin laki-laki dengan jumlah 17 orang, dan 15 orang perempuan. Komposisi pegawai berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel seperti di bawah:

TABEL 2

JENIS KELAMIN	GOLONGAN RUANG				JUMLAH
	I	II	III	IV	
Laki-Laki	0	5	8	4	17
Perempuan	0	5	10	0	15
TOTAL	0	10	18	4	32

GRAFIK 2



c. Berdasarkan Jabatan Fungsional

Hingga saat ini KPKNL Padang telah memiliki pejabat fungsional 3 yaitu 1 orang Pelelang Ahli Muda, 1 orang Pelelang Ahli Pertama dan 1 orang Penilai Ahli Pertama. Sejumlah 23 orang pegawai memiliki kompetensi fungsional, masing-masing dengan keahlian sebagai Juru Sita, Pejabat Lelang, Penilai, dan Pemeriksa serta Pelelang Ahli Muda dan Ahli Pertama. Tabel dibawah ini menunjukkan jumlah pegawai dengan kompetensi fungsional.

TABEL 3

Unit Kerja	Jurusita	Pejabat Lelang	Pemeriksa	Penilai	Jumlah
	2	2	1	2	7
Seksi Hukum dan Informasi	0	1	0	0	1
Seksi Kepatuhan Internal	1	0	0	0	1
Seksi Pelayanan Lelang	1	3	1	1	6
Seksi Pelayanan Penilaian	1	1	1	2	5
Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara	0	0	0	1	1
Seksi Piutang Negara	1	0	0	1	2
Total	6	7	3	7	23

ISU STRATEGIS ORGANISASI

Sebagai organisasi yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan kekayaan Negara, pelayanan penilaian, pengurusan piutang negara, dan pelayanan lelang, KPKNL Padang memiliki peran strategis dan permasalahan sebagai berikut:

a. Memberikan Pelayanan Lelang

KPKNL Padang sebagai Kantor pelayanan memberikan pelayanan lelang berupa penyediaan sarana transaksi penjualan secara umum. KPKNL Padang memberikan pelayanan lelang baik lelang eksekusi maupun non eksekusi yang berasal dari instansi pemerintah, BUMN/D, swasta maupun masyarakat. Keuntungan melakukan penjualan dengan mekanisme lelang dibandingkan dengan transaksi jual biasa adalah jual beli melalui lelang bersifat lebih transparan, akuntabel, kompetitif, efisien dan menjamin kepastian hukum dengan adanya risalah lelang sebagai alat bukti otentik.

Permohonan lelang yang banyak diajukan ke KPKNL Padang selama tahun 2020 adalah Lelang Eksekusi Wajib Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT) atas barang tidak bergerak dari kreditur/ bank, sementara daya beli masyarakat atau swasta masih rendah dikarenakan kondisi ekonomi dan banyaknya gugatan atas lelang tersebut serta kesulitan untuk penguasaan barang setelah dibeli.

Khususnya di tahun 2020, Presiden Joko Widodo menetapkan penyebaran wabah virus Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai bencana nasional yang tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional. Ditambah adanya isu gempa besar akan terjadi di Sumatera Barat, sehingga menurunkan minat investor menanamkan modal di Sumatera Barat.

Untuk mencapai target pokok lelang, Seksi Pelayanan Lelang terus melakukan penggalan potensi lelang ke berbagai instansi, perbankan, masyarakat, BUMN/D dan swasta. Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah menyelenggarakan lelang sukarela UMKM produk lokal Kota Padang dalam rangka Bulan Sinergi 112 tahun Lelang Indonesia.

b. Memberikan Pelayanan Pengurusan Piutang Negara

Peran strategis KPKNL Padang dalam pelayanan pengurusan piutang negara adalah sebagai pihak yang melakukan penagihan dan pengelolaan piutang macet yang berasal dari instansi pemerintah dan badan usaha yang dikuasai oleh negara baik secara langsung maupun tidak langsung berdasarkan perjanjian, peraturan perundangan dan sebab apapun dalam rangka penyelamatan keuangan negara.

Pada tahun 2014 lalu, semua piutang negara yang berasal dari pihak bank telah dikembalikan seluruhnya.

Dampak dari adanya bencana non alam di tahun 2020 membuat debitur kesulitan dalam melakukan pembayaran angsuran maupun pelunasan terhadap piutangnya. Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan pendapatan BIAD seperti melakukan penelitian lapangan secara langsung.

Selain itu, KPKNL Padang melakukan penggalian potensi ke berbagai instansi daerah untuk kembali meningkatkan penerimaan negara bukan pajak dan bekerjasama dengan badan usaha yang dikuasai oleh negara seperti BPJS Ketenagakerjaan yang ikut andil dalam rangka pencapaian target BIAD dan PNDS pada tahun 2020.

c. Melakukan Pengelolaan Kekayaan Negara

KPKNL Padang memiliki peran strategis untuk meningkatkan pengelolaan kekayaan negara untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna kekayaan negara. Sebagai pengelola kekayaan negara, KPKNL Padang telah melakukan inventarisasi dan penilaian asset untuk pemutakhiran pembukuan BMN, penatausahaan BMN pada satuan kerja dalam program *clearance asset* dan melakukan tindak lanjut penatausahaan BMN yang tertib dan optimal. Di samping itu, di tahun 2020 ini Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara telah berhasil memberikan sosialisasi dan mengimplementasikan aplikasi SIMAN pada berbagai satuan kerja wilayah KPKNL Padang, sebagai sebuah terobosan digitalisasi asset dalam penatausahaan dan pengelolaan BMN.

Sedangkan, di lain pihak masih rendahnya kesadaran satker akan pentingnya penatausahaan dan pengelolaan BMN mengharuskan Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara di tahun 2020 ini untuk lebih aktif dalam mengadakan sosialisasi dan pelayanan secara *daring* maupun langsung ke berbagai satuan kerja wilayah KPKNL Padang. Terlebih dalam tahun 2020, KPKNL Padang mendapatkan target dalam penyelesaian atau perbaikan atas sisa asset objek penilaian kembali Barang Milik Negara.

d. Melakukan Penilaian Kekayaan Negara

KPKNL Padang mempunyai peranan dalam menyediakan informasi nilai wajar asset dari setiap kekayaan negara berupa tanah, bangunan, kendaraan, dan barang

milik negara lainnya yang digunakan oleh K/L. Dalam tahun 2020, KPKNL Padang melaksanakan penyelesaian atau perbaikan atas sisa asset objek penilaian kembali Barang Milik Negara berupa tanah dan bangunan, hasil penilaian barang milik negara tersebut antara lain akan digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang lebih akuntabel dan handal, penilaian juga dilaksanakan dalam rangka pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik negara, penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan pengurusan piutang negara. Dengan demikian hasil penilaian dapat membantu mewujudkan pengelolaan kekayaan negara yang optimal, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *The Highest and Best Use*.

e. Memberikan Kontribusi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ke Kas Negara

KPKNL Padang memperoleh hasil berupa biaya administrasi Pengurusan Piutang Negara dan Bea Lelang yang disetorkan ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak. Selain itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak juga diperoleh dari hasil pengelolaan kekayaan negara dengan pihak ketiga, dimana satuan kerja menyetorkan sendiri ke Kas Negara sesuai dengan persetujuan pengelolaan BMN yang diterbitkan KPKNL Padang mendukung tujuan DJKN sebagai *Distinguished Asset Manager*.

SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika penyajian LAKIN KPKNL Padang Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Ringkasan Eksekutif;

Memuat visi, misi, sasaran strategis, dan gambaran umum KPKNL Padang, serta capaian-capaian yang berhasil dibukukan oleh KPKNL Padang selama tahun 2020.

Bab I Pendahuluan;

Pada bab ini dijelaskan mengenai tugas, fungsi, dan struktur organisasi serta aspek strategis organisasi yang dimiliki KPKNL Padang dan permasalahan utama (*strategic issues*) dan yang terakhir sistematika penyajian LAKIN 2020.

Bab II Perencanaan Kinerja;

Bab ini menyajikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja KPKNL Padang pada tahun 2020 dan langkah yang dilakukan KPKNL Padang untuk mencapai tujuannya.

Bab III Akuntabilitas Kinerja;

Mengungkapkan pengukuran capaian indikator kinerja utama, evaluasi dan analisis kinerja, kinerja lainnya, dan akuntabilitas keuangan.

Bab VI Penutup

Menyajikan tentang simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah yang akan dilakukan KPKNL Padang untuk meningkatkan kinerja di tahun-tahun mendatang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

RENCANA STRATEGIS

Perencanaan Strategis adalah rencana tindakan dan kegiatan yang bersifat koordinatif dan sistematis yang bertujuan untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan dalam rentang waktu tertentu. Perencanaan strategis KPKNL Padang disusun sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Rencana strategi disusun agar pelaksanaan tugas pokok fungsi KPKNL Padang sebagai instansi pelayanan dapat mencapai hasil yang diharapkan.

Visi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Padang adalah: *“Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang Profesional dan Akuntabel untuk Sebesar-Besar Kemakmuran Rakyat.”*

Visi tersebut mengandung pesan bahwa KPKNL Padang sebagai lembaga/institusi yang mempunyai tugas untuk melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara, dan pelayanan lelang. Profesional adalah pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara, dan pelayanan lelang dilaksanakan sesuai prosedur, norma, waktu, standar profesi, dan standar keilmuan yang telah ditetapkan. Akuntabel adalah pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara, dan pelayanan lelang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat adalah pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara, dan pelayanan lelang dilaksanakan untuk kepentingan negara dalam rangka mewujudkan kemakmuran rakyat melalui: (i) optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran, dan efektifitas pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara, dan pelayanan lelang, (ii) peningkatan pembiayaan dalam negeri, serta (iii) integrasi pengelolaan kekayaan negara dengan penganggaran.

Dalam rangka mewujudkan visi yang telah ditetapkan tersebut, diperlukan suatu penetapan arah gerak serta batasan lingkup kinerja KPKNL Padang yang tertuang dalam misi yaitu:

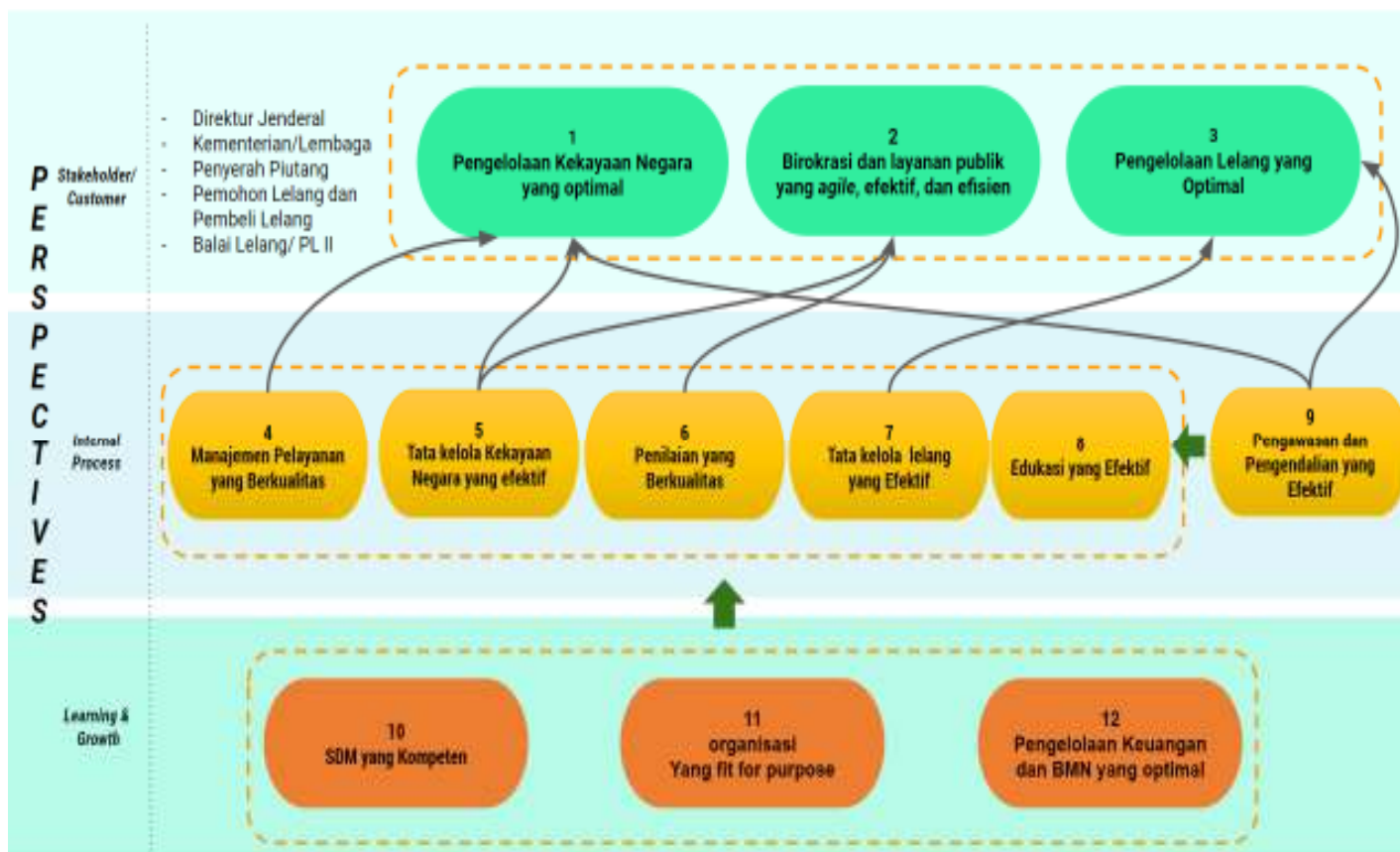
- a. Mewujudkan optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran, dan efektifitas pengelolaan kekayaan negara

- b. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum
- c. Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan investasi pemerintah
- d. Mewujudkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan
- e. Melaksanakan pengurusan piutang negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel
- f. Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, efisien, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat

PERJANJIAN KINERJA

Dalam melaksanakan rencana kerja yang telah ditetapkan sebelumnya, KPKNL Padang membuat suatu penetapan kinerja yang merupakan ikhtisar dari rencana kerja yang akan dicapai pada satu waktu tertentu. Penetapan Kinerja KPKNL Padang tahun 2020 sesuai dengan peta strategis Kemenkeu Three Tahun 2018, terdiri dari 12 Sasaran Strategis (SS) dan 21 Indikator Kinerja Utama (IKU).

**GAMBAR 3
PETA STRATEGIS**



TABEL 4
KONTRAK KINERJA

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
1.	Pengelolaan kekayaan negara yang optimal	1a-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%
		1b-CP	Tingkat <i>outstanding</i> piutang negara	95%
		1c-N	Persentase pengukuran tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK	100%
2.	Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien	2a-CP	Indeks kepuasan pengguna layanan KPKNL	4,40 (Skala 5)
3.	Pengelolaan lelang yang optimal	3a-CP	Persentase hasil lelang (Pokok Lelang)	100%
4.	Manajemen pelayanan yang berkualitas	4a-CP	Rata-rata indeks ketepatan waktu penyelesaian layanan kekayaan negara dan lelang	90 (skala 100)
5.	Tata kelola kekayaan negara yang efektif	5a-CP	Persentase bidang tanah BMN yang disertipikatkan	100%
		5b-CP	Persentase efektivitas penyelesaian BKNP	100%
		5c-CP	Persentase nilai kekayaan negara yang diutilisasi	100%
		5d-CP	Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%
6	Penilaian yang berkualitas	6a-CP	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	30%
7.	Tata kelola lelang yang efektif	7a-CP	Persentase produktivitas lelang	34%
		7b-CP	Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction	90%
8.	Edukasi yang efektif	8a-N	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	90
9.	Pengawasan dan pengendalian yang efektif	9a-CP	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan aset	80%
		9c-CP	Persentase tindak lanjut penyelesaian/perbaikan atas sisa aset objek penilaian kembali BMN	100%
10.	SDM yang kompeten	10a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%
11.	Organisasi yang <i>fit for purpose</i>	11a-N	Nilai Pemenuhan Unit Kerja terhadap kriteria ZI menuju WBBM	85 (skala 100)

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		11b-N Nilai hasil <i>review</i> pengelolaan kinerja berbasis BSC	70 (skala 100)
		11c-N indeks efektivitas penyelenggaraan FGD Kode Etik Pegawai	80 (skala 100)
12.	Pengelolaan BMN dan keuangan yang optimal	12a-CP Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95%

Kegiatan, <i>Ouput</i> , dan Indikator <i>Output</i>	Anggaran
1. Surat Persetujuan/Penolakan atas Permohonan Pengelolaan BMN	135.454.000
2. Rekomendasi BMN berupa Tanah yang Disertipikatkan (PU)	35.976.000
3. Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan BMN	13.778.000
4. Kajian Portofolio Aset	62.180.000
5. Dokumen Pengurusan Piutang Negara	84.589.000
6. Risalah Lelang	102.323.000
7. Layanan Sarana dan Prasarana Internal	83.570.000
8. Layanan Dukungan Manajemen Satker	48.498.000
9. Layanan Perkantoran	3.945.627.000

PENGUKURAN KINERJA

Dalam rangka mengukur capaian indikator kinerja tahun 2018, KPKNL Padang berpedoman kepada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/KMK.01/2014 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan.

PERKEMBANGAN IMPLEMENTASI PENGELOLAAN KINERJA

Pengelolaan Kinerja merupakan serangkaian proses dari penyusunan rencana kerja sampai dengan pelaksanaan evaluasi untuk memastikan visi dan misi organisasi dapat tercapai. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian kinerja Kemenkeu-Three dilaksanakan secara rutin setiap triwulannya.

Selain evaluasi capaian kinerja, KPKNL Padang juga melakukan reviu kontrak kinerja dengan tujuan untuk memperbaiki budaya kinerja organisasi, meningkatkan

awaranness unit KPKNL Padang dalam rangka tertib administrasi dokumen pengelolaan kinerja organisasi, dan mendapatkan *feedback* untuk perbaikan pengelolaan kinerja.

ADENDUM KONTRAK KINERJA

Berkenaan dengan telah dilaksanakan Dialog Kinerja Organisasi (DKO) Tingkat Kemenkeu-Wide pada 1 Agustus 2020 dan nota dinas Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan nomor:ND-1105/SJ.1/2020 tanggal 5 Agustus 2020 hal Arahan Menteri Keuangan dalam DKO Triwulan II Tahun 2020 dan Penetapan Adendum Kontrak Kinerja dan Piagam Risiko. Menteri Keuangan menyampaikan arahan antara lain, dalam menghadapi situasi extraordinary, serta terkait perubahan Perpres Tahun 54 Tahun 2020 dan Perpres Nomor 72 Tahun 2020, perubahan IKU dan identifikasi risiko harus dilakukan secara *scrutinize* sehingga dapat menangkap perubahan kebijakan.

Atas dasar pertimbangan tersebut, para kepala KPKNL menugaskan Mitra Manajer Kinerja Organisasi (MMKO) dhi. Kepala Seksi Kepatuhan Internal pada KPKNL untuk menyusup konsep Adendum KK Kepala KPKNL Padang untuk kemudian dilakukan reviu oleh Submanajer Kinerja Organisasi (SMKO) di lingkungan kantor wilayah.

a. Perubahan Indikator Kinerja Utama dan Target

Kode IKU	Indikator Kinerja Utama dan Target							
	Sebelum				Menjadi			
1b-CP	Tingkat Outstanding Piutang Negara (<i>Polarisasi minimize</i>)				Tingkat Outstanding Piutang Negara (<i>Polarisasi maximize</i>)			
	Q1	Q1	Q2	Q4	Q1	Q1	Q2	Q4
	99%	98%	97%	95%	0,5%	1%	2%	3%

b. Perubahan target dan/atau *trajectory*

Kode IKU	IKU	Sebelum				Menjadi			
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
3a-CP	Persentase hasil lelang (Pokok lelang)	10 %	30 %	60 %	100 %	10 %	30 %	50 %	100 %
1c-N	Persentase Pengukuran Tingkat kesesuaian	25 %	50 %	75 %	100 %	-	50 %	75 %	100 %

	Penggunaan BMN dengan SBSK								
5d-CP	Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN/portofolio asset	25 %	50 %	80 %	100 %	-	50 %	80 %	100 %
9b-CP	Persentase tindak lanjut penyelesaian/perbaikan atas sisa asset objek penilaian kembali BMN	10 %	25 %	75 %	100 %	5%	25 %	75 %	100 %

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja tahun 2020 terhadap 21 (dua puluh satu) Indikator Kinerja Utama KPKNL Padang diperoleh hasil dimana seluruh IKU mencapai target yang ditentukan. Berikut rincian capaian kinerja atas 21 (dua puluh satu) IKU KPKNL Padang tahun 2020:

**TABEL 5
CAPAIAN KINERJA**

N o.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Awal 2020	Target Addendum	Realisasi	%	
1.	Pengelolaan kekayaan negara yang optimal	1a-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang				
			a. PNBPN Pengelolaan BMN	Rp10.937.586.081	Rp6.596.864.848	Rp10.169.996.710	154%
			b. PNBPN Piutang Negara	Rp19.996.270	Rp15.997.016	Rp8.425.445	53%
			c. PNBPN Lelang	Rp3.040.000.000	Rp3.040.000.000	Rp2.045.490.144	67%
		1b-CP	Tingkat <i>outstanding</i> piutang negara	Rp645.757.869		Rp767.579.741	119%
1c-N	Persentase pengukuran tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK	100%		100%	100%		
2.	Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien	2a-CP	Indeks kepuasan pengguna layanan KPKNL	4,4 (skala 5)		4,85 (skala 5)	110%
3.	Pengelolaan lelang yang optimal	3a-CP	Persentase hasil lelang (Pokok Lelang)				
			a. Pokok Lelang Kelas I	Rp53.000.000.000		Rp29.194.836.581	55%
			b. Pokok Lelang Pegadaian	Rp46.650.000.000		Rp20.125.172.800	43%
4.	Manajemen pelayanan yang berkualitas	4a-CP	Rata-rata indeks ketepatan waktu penyelesaian layanan kekayaan negara dan lelang	90 (skala 100)		98,39 (skala 100)	109%
5.	Tata kelola kekayaan negara yang efektif	5a-CP	Persentase bidang tanah BMN yang disertipatkan	100%		120%	120%
		5b-CP	Persentase efektivitas penyelesaian BKPN	100%		120%	120%

LAPORAN KINERJA KPKNL PADANG TAHUN 2020

		5c-CP	Persentase nilai kekayaan negara yang diutilisasi	Rp8.994.933.000.000		Rp9.918.426.932.291	110%
		5d-CP	Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%		100%	100%
6	Penilaian yang berkualitas	6a-CP	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	30%		120%	25%
7.	Tata kelola lelang yang efektif	7a-CP	Persentase produktivitas lelang	34%		120%	28%
		7b-CP	Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction	90%		111%	81%
8.	Edukasi yang efektif	8a-N	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	90		92,5	103%
9.	Pengawasan dan pngendalian yang efektif	9a-CP	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan aset	80%		120%	150%
		9c-CP	Persentase tindak lanjut penyelesaian/pebaikan atas sisa aset objek penilaian kembali BMN	100%		100%	100%
10	SDM yang kompeten	10a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%		120%	120%
11	Organisasi yang <i>fit for purpose</i>	11a-N	Nilai Pemenuhan Unit Kerja terhadap kriteria ZI menuju WBBM	85 (skala 100)		82,09 (skala 100)	97%
		11b-N	Nilai hasil <i>review</i> pengelolaan kinerja berbasis BSC	70 (skala 100)		70 (skala 100)	100%
		11c-N	indeks efektivitas penyelenggara n FGD Kode Etik Pegawai	80 (skala 100)		97,96 (skala 100)	122%
12	Pengelolaan BMN dan keuangan yang optimal	12a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95%		96%	101%

Jumlah Anggaran Program Tahun 2020 : Rp3.304.975.000
 Jumlah Realisasi Anggaran Program Tahun 2020 : Rp2.935.618.713
 Jumlah Efisiensi Anggaran Program Tahun 2020 : Rp 369.356.287

Pada tahun 2020, KPKNL Padang mencapai Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 103,40. Dari 12 IKU terdapat 1 IKU yang capaiannya merah, yaitu IKU Persentase Hasil Lelang. Nilai Kinerja Organisasi tahun 2020 ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena IKU Persentase hasil Lelang pada

tahun ini juga memperhitungkan pokok lelang pegadaian sebagai capaian Kinerja KPKNL Padang, dengan penetapan target yang terlalu tinggi, sedangkan kendali pencapaian target rendah.

Selain itu, adanya pandemi covid-19 mengakibatkan melemahnya daya beli masyarakat dan isu gempa besar akan terjadi di Sumatera Barat, sehingga menurunkan minat investor menanamkan modal di Sumatera Barat.

Dari hasil evaluasi kinerja terhadap 12 (dua belas) IKU Kemenkeu-Three tahun 2020 diperoleh hasil analisis kinerja atas pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Kemenkeu-Three tahun 2020 sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1: Pengelolaan kekayaan negara yang optimal

Dengan Indikator Kinerja Utama:

a. Persentase penerimaan Negara dari pengelolaan kekayaan Negara dan lelang

Persentase penerimaan Negara dari pengelolaan kekayaan Negara dan lelang tertuang dalam IKU pada tahun 2020, KPKNL Padang ditargetkan memperoleh persentase 100%, pada akhir tahun anggaran KPKNL Padang memperoleh 120% dari target yang telah ditetapkan. Hal ini diperoleh dari kerjasama antar pejabat dan pegawai KPKNL Padang dan *stakeholder* yang berada di wilayah kerja KPKNL Padang. Perbandingan manfaat ekonomi pengelolaan kekayaan Negara antara target dan realisasi kinerja untuk KPKNL Padang antara lain sebagai berikut:

TABEL 6

No	Keterangan	Target Adendum	Realisasi
1.	Target/Realisasi nominal PNBP Pengelolaan BMN	Rp 6.596.864.848	Rp10.169.996.710
2.	Target/Realisasi nominal PNBP Piutang Negara	Rp15.997.016	Rp8.425.445
3.	Target/Realisasi nominal PNBP Lelang	Rp3.040.000.000	Rp2.045.490.144
	Total	Rp9.652.861.864	Rp.12.223.912.299

b. Tingkat penrusan outstanding piutang Negara (saldo PNDS s.d 2016)

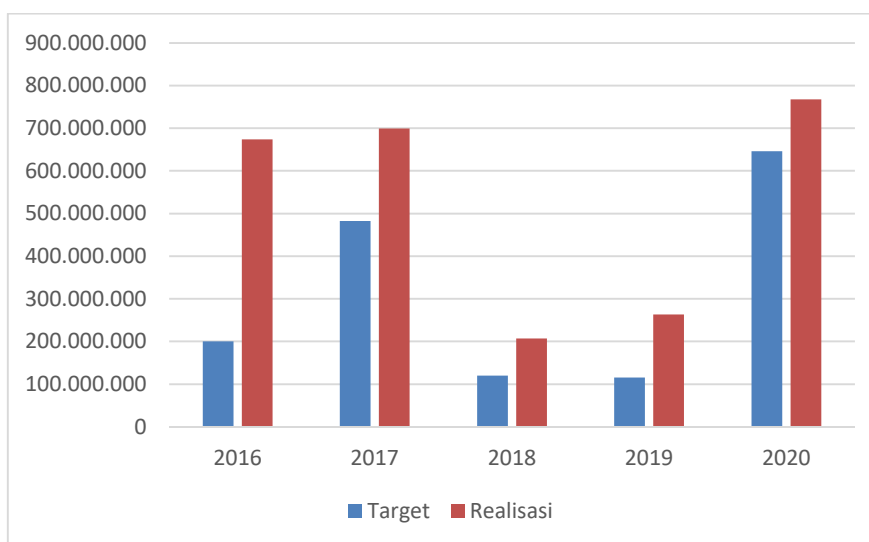
Nilai Outstanding PN dengan Berkas sampai dengan 31 Des 2016 /Realisasi PNDS dengan kriteria berkas sampai dengan 31 Des 2016. Target yang diberikan berjumlah Rp.645.757.869 dan realisasi yang diperoleh sebesar Rp.767.579.741. Capaian realisasi tersebut dapat memenuhi target karena kemampuan dan itikad debitur untuk menyelesaikan hutangnya serta upaya proaktif dari pegawai KPKNL Padang.

Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja beberapa tahun terakhir untuk KPKNL Padang antara lain:

TABEL 7

PNDS	2016	2017	2018	2019	2020
Target	200.000.000	482.500.000	120.000.000	115.344.249	645.757.869
Realisasi	674.131.651	699.440.429	206.746.498	263.709.103	767.579.741

GRAFIK 3



Perbandingan Realisasi Piutang Negara yang Dapat Diselesaikan (PNDS) dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 mengalami penurunan dikarenakan semua BKPN BUMN/D Perbankan atau Non Perbankan telah dikembalikan ke masing-masing penyerah piutang sesuai PMK 168/PMK.06/2013. Pada tahun 2020, Kendala Pencapaian Target:

1. Dengan adanya pandemi Covid-19 mengakibatkan susahny perekonomian masyarakat sehingga debitur yang berhutang tidak mampu untuk membayar hutang.
2. Adanya beberapa debitur telah melunasi hak penyerah piutang sementara biad belum dibayar.

c. Persentase pengukuran tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK

Maksud dan tujuan dari SBSK ini adalah untuk memastikan asset negara yang dikelola telah terutilisasi sesuai dengan potensi terbaiknya (*highest and best use principle*). Sasaran strategis dari SBSK ini adalah terwujudnya pengelolaan kekayaan negara yang optimal melalui penggunaan Barang Milik Negara (BMN) yang sesuai

Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) Barang Milik Negara atas Pengelolaan Asset Negara. Adapun target pengukuran tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK adalah :

- i) Tanah Bangunan Gedung Kantor (termasuk data luas total dan luas dasar bangunan semua bangunan yang berdiri di atasnya)
- ii) Tanah Bangunan Rumah Negara (termasuk data luas total dan luas dasar bangunan semua bangunan yang berdiri di atasnya)
- iii) Bangunan Gedung Kantor
- iv) Bangunan Rumah Negara

Adapun target addendum yang diberikan adalah 246 dan di tahun 2020 telah tercapai realisasi sesuai dengan target tersebut.

Sasaran Strategis 2: Pelayanan publik yang prima

Dengan Indikator Kinerja Utama:

Indeks kepuasan pengguna layanan pada kantor pelayanan

Realisasi indeks kepuasan pengguna layanan pada kantor pelayanan pada tahun 2019 sebesar 4,85 (skala 5). Indeks kepuasan layanan pengguna layanan diukur untuk mengetahui tingkat kepuasan pengguna terhadap pelayanan yang diberikan KPKNL Padang di bidang pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara, dan pelayanan lelang. Indeks kepuasan diukur melalui survei yang dilakukan oleh internal KPKNL Padang.

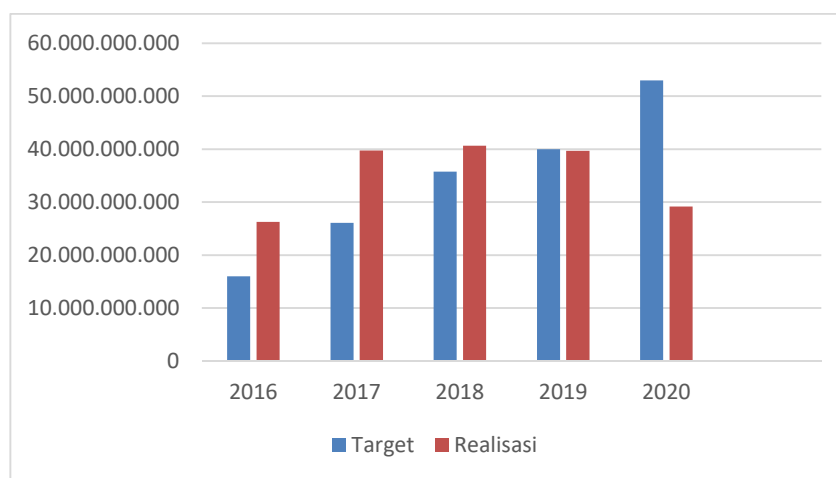
Layanan	Total Indeks
Pengelolaan Kekayaan Negara	4,85
Piutang Negara	4,90
Pelayanan Penilaian	4,85
Pelayanan Lelang	4,81
Indeks Kepuasan	4,85

Sasaran Strategis 3: Pengelolaan lelang yang optimal**Dengan Indikator Kinerja Utama:****Persentase hasil lelang (Pokok Lelang)**

Realisasi pokok lelang dari kelas I pada tahun 2020 tercapai sebesar Rp 29.194.836.581,00 dari target yang ditetapkan sebesar Rp53.000.000.000. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja beberapa tahun terakhir untuk KPKNL Padang antara lain:

TABEL 8

Pokok Lelang	2016	2017	2018	2019	2020
Target	16.000.000.000	26.100.000.000	35.752.000.000	40.000.000.000	53.000.000.000
Realisasi	26.258.659.910	39.731.768.720	40.675.581.100	39.666.016.596	29.194.836.581

GRAFIK 4

Realisasi Pokok Lelang pada tahun 2020 sedikit dibawah dari target yang diberikan. Sedangkan untuk target dan realisasi PNPB Lelang dan Pokok Lelang dari Pegadaian adalah sebagai berikut :

TABEL 9

	Target	Realisasi
PNBP Lelang	3.040.000.000	2.045.490.144
Pokok Lelang Pegadaian	46.650.000.000	20.125.172.800

Kendala Pencapaian Target:

- Pandemi Covid-19 mengakibatkan melemahnya daya beli masyarakat.
- Adanya isu gempa besar akan terjadi di Sumatera Barat, sehingga menurunkan minat investor menanamkan modal di Sumatera Barat.

Namun, KPKNL Padang tetap terus berupaya dan kerja keras untuk terus meningkatkan capaian di tahun mendatang. KPKNL Padang terus berkoordinasi dengan pemohon lelang baik dari pihak perbankan maupun PT.Pegadaian untuk menggali potensi lelang.

Sasaran Strategis 4: Manajemen pelayanan yang berkualitas

Dengan Indikator Kinerja Utama:

Rata-rata indeks ketepatan waktu penyelesaian layanan kekayaan negara dan lelang

Realisasi Persentase pemenuhan waktu penyelesaian layanan kekayaan negara pada tahun 2020 ialah sebesar 98,39 dari target sebesar 90.

Sasaran Strategis 5: Tata kelola kekayaan negara yang efektif

Dengan Indikator Kinerja Utama:

a. Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan

Identifikasi merupakan proses pemetaan BMN berupa bidang tanah pada Kementerian/Lembaga melalui Sistem Informasi Manajemen Pendataan Tanah Pemerintah (SIMANTAP). Pemetaan tanah dilakukan berdasarkan lokasi, luas tanah, batas-batas, nilai BMN dan nama pemilik tanah. Sertifikat tanah adalah surat tanda bukti hak atas tanah yang dibukukan dalam buku tanah tersebut. Persentase BMN berupa bidang tanah pada K/L yang diidentifikasi sudah dan didata pada tahun 2020 yaitu sebanyak 505 bidang tanah dari target addendum sebanyak 124 bidang tanah.

b. Persentase efektivitas penyelesaian BKPN

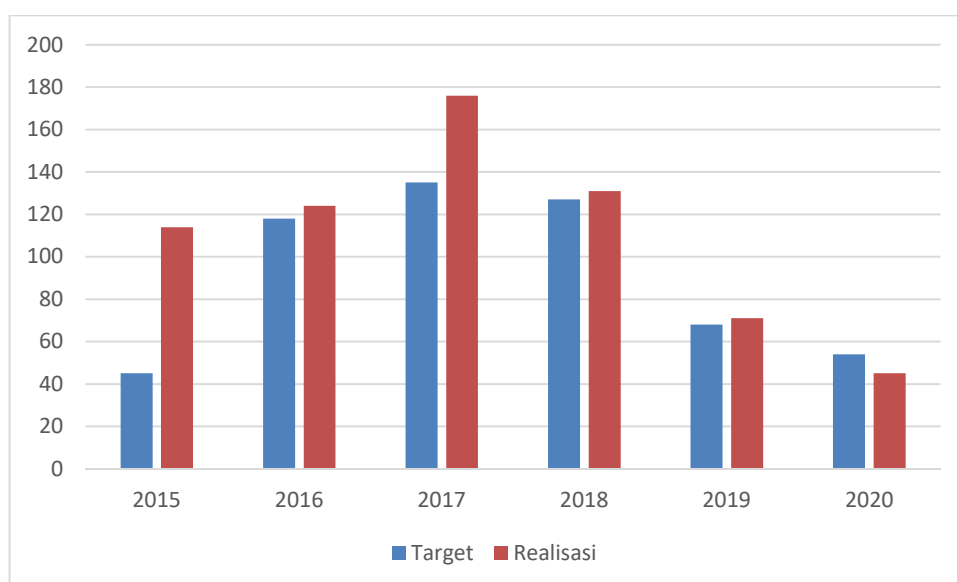
Penatausahaan Berkas Kasus Piutang negara (BKPN) memiliki peran yang sangat penting dalam pengurusan piutang negara dimana saat ini menjadi salah satu tugas Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Jumlah BKPN yang dapat diselesaikan (lunas,

ditarik, PSBDT, dikembalikan) pada tahun 2020 tercapai sebesar 54 berkas dari target addendum sebanyak 45 berkas. Capaian ini sejalan dengan jumlah piutang Negara yang dapat diselesaikan. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja beberapa tahun terakhir untuk KPKNL Padang antara lain :

TABEL 10

BKPN	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Target	45	118	135	127	68	54
Realisasi	114	124	176	131	71	45

GRAFIK 5



Perbandingan Realisasi BKPN yang Dapat Diselesaikan (lunas, ditarik, PSBDT, dikembalikan) (PNDS) dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 capaian ini sejalan dengan jumlah piutang negara yang dapat diselesaikan.

c. Persentase nilai kekayaan negara yang diutilisasi

Utilisasi kekayaan negara merupakan optimalisasi pendayagunaan Barang Milik Negara/Kekayaan Negara (BMN/KN) pada K/L dalam rangka pelaksanaan pengelolaan kekayaan negara yang optimal. Kekayaan negara yang diutilisasi meliputi:

- 1) Penetapan status penggunaan kekayaan negara yang meliputi penetapan status BMN pada K/L dan Kementerian/Lembaga yang telah mengajukan Alih Status Penggunaan BMN kepada K/L lain.

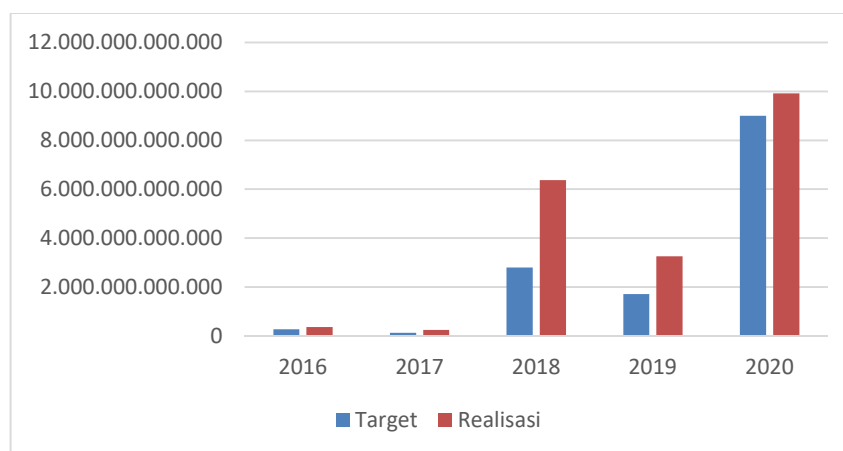
- 2) Pemanfaatan kekayaan negara melalui sewa, Kerja Sama Pemanfaatan (KSP), Kerjasama Infrastruktur (KSI), pinjam pakai, Bangun Serah Guna (BSG), Bangun Guna Serah (BGS);
- 3) Tukar menukar dan penyertaan modal pemerintah dari konversi aset.

Berdasarkan Kontrak Kinerja KPKNL Padang dengan Kanwil DJKN Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau, target Kekayaan Negara yang diutilisasi ialah sebesar Rp 8.994.933.000.000. Dari hasil evaluasi kinerja tahun 2020, realisasi kekayaan Negara yang diutilisasi ialah sebesar Rp 9.918.426.932.291. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja beberapa tahun terakhir untuk KPKNL Padang antara lain:

TABEL 11

Utilisasi	2016	2017	2018	2019	2020
Target	270.000.000.000	135.000.000.000	2.800.000.000.000	1.717.936.676.232	8.994.933.000.000
Realisasi	371.060.364.792	251.500.000.000	6.369.844.362.442	3.262.185.353.044	9.918.426.932.291

GRAFIK 6



Dapat dilihat bahwasanya realisasi utilisasi setiap tahun mengalami peningkatan, hal ini dikarenakan koordinasi dan kerjasama dengan berbagai K/L semakin lebih baik dari tahun ke tahun. Setiap tahun minimal 1 (satu) kali seksi pelayanan kekayaan negara mengadakan sosialisasi pengelolaan kekayaan negara, diundang oleh satuan kerja atau diadakan di KPKNL Padang. KPKNL Padang berkomitmen untuk mendukung program DJKN sebagai *Distinguished Asset Manager*.

d. **Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)**

Mulai Tahun 2020, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) selaku Pengelola Barang melakukan upaya peningkatan mutu pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) melalui evaluasi kinerja Portofolio Aset. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan salah satu misi DJKN yaitu mewujudkan optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran, dan efektivitas pengelolaan kekayaan Negara. KPKNL Padang telah menyelesaikan semua target addendum 59 portofolio.

Sasaran Strategis 6: Penilaian yang berkualitas

Dengan Indikator Kinerja Utama:

Deviasi ketergunaan hasil penilaian

Terkait deviasi ketergunaan hasil penilaian, nilai yang disampaikan dalam laporan penilaian dapat digunakan sebagai dasar persetujuan atau penolakan pemindahtanganan dan pemanfaatan BMN. Penyelesaian atau perbaikan objek penilaian kembali BMN juga menjadi fokus tahun 2020 dan harus dapat diselesaikan secara tuntas dan berkualitas. Persentase realisasi yang dicapai mencapai 120% dari target yang diberikan.

Sasaran Strategis 7: Tata kelola lelang yang efektif

Dengan Indikator Kinerja Utama:

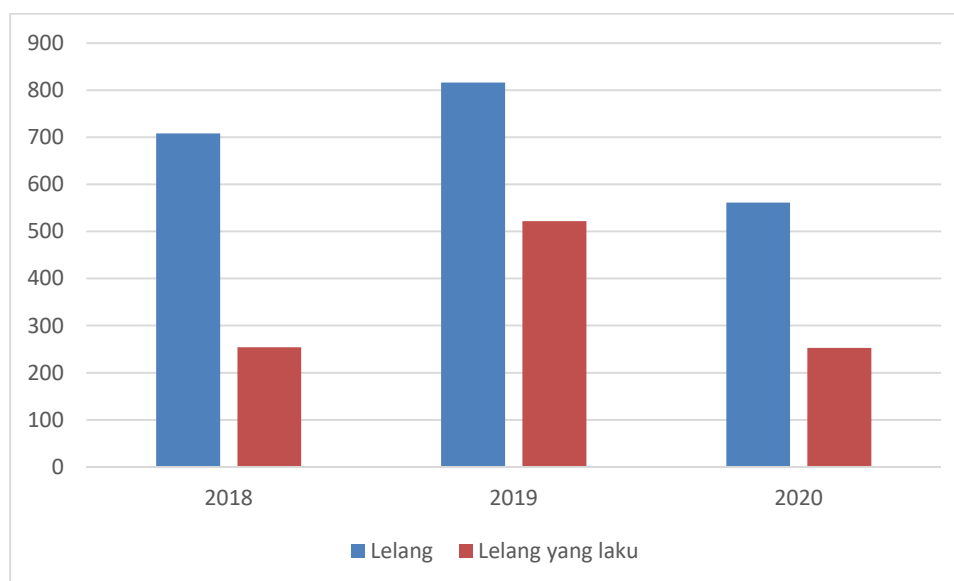
a. Presentase produktifitas lelang

Realisasi jumlah frekuensi lelang pada tahun 2020 sebanyak 561 frekuensi dengan lelang yang laku sebanyak 253 frekuensi. Realisasi presentase produktifitas lelang mencapai 45,00% dari target yang ditetapkan sebesar 34%.

TABEL 12

Frekuensi	2018	2019	2020
Lelang	708	816	561
Lelang yang laku	254	522	253

GRAFIK 7



b. Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction

Pada tahun 2020, seluruh kegiatan pelaksanaan lelang dilaksanakan dengan *e-auction* melalui *lelang.go.id*. Selain itu, *e-conventional auction* adalah lelang konvensional dengan kehadiran peserta tetapi memanfaatkan *virtual account* sebagai sistem pembayarannya (penyetoran dan pengembalian uang jaminan). Penggunaan *virtual account* sebagai sistem pembayaran ini diharapkan dapat mempermudah dan mempercepat proses transaksi lelang.

TABEL 13

Frekuensi	2020
Jumlah realisasi Frekuensi e-Auction	560
Jumlah realisasi Frekuensi e-Conventional Auction	1

Sasaran Strategis 8: Edukasi yang efektif

Dengan Indikator Kinerja Utama: Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi

Berdasarkan Kontrak Kinerja KPKNL Padang dengan Kanwil DJKN Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau, target IKU “Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi” tahun 2020 ditetapkan sebesar 90,00. Dari hasil evaluasi kinerja, target tersebut telah terealisasi sebesar 92,50 dari target yang ditetapkan. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja beberapa tahun terakhir untuk KPKNL Padang antara lain:

TABEL 14

Edukom	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Target	80	80	85	87	87	90
Realisasi	88,60	88	92,19	92,35	93,495	92,50

Sasaran Strategis 9: Pengawasan dan Pengendalian yang efektif

Dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama:

a. Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan aset

Realisasi Persentase tindak lanjut pengelolaan Aset di KPKNL Padang pada tahun 2019 adalah 100% dari target yang ditetapkan sebesar 90%.

Jumlah persetujuan/penetapan pengelolaan BMN periode semester II 2019 yang ditindaklanjuti oleh K/L	32
Jumlah persetujuan/penetapan pengelolaan BMN periode semester I 2020 yang ditindaklanjuti oleh K/L	29
Jumlah persetujuan/penetapan pengelolaan BMN yang diterbitkan pengelola barang periode semester II 2019	32
Jumlah persetujuan/penetapan pengelolaan BMN yang diterbitkan pengelola barang periode semester I 2020	29

b. Persentase tindak lanjut penyelesaian/perbaikan atas sisa aset objek penilaian kembali BMN

Tahun 2020, seluruh unit vertical DJKN di Indonesia ditargetkan untuk menindaklanjuti penyelesaian/perbaikan atas sisa asset objek penilaian kembali BMN, termasuk KPKNL Padang. Pada target awal tahun 2020, KPKNL Padang mendapatkan 16.455 NUP, kemudian dalam target addendum menjadi 13.381 NUP. Dan diakhir tahun KPKNL Padang telah menyelesaikan 13.421 NUP hingga status BAR IP Selesai (status IX / 100%).

Sasaran Strategis 10: SDM yang kompetitif**Dengan Indikator Kinerja Utama:****Persentase pengembangan kompetensi pegawai**

KPKNL Padang berhasil mencapai sebesar 100% dari target sebesar 100%. Persentase pengembangan kompetensi pegawai menggambarkan kesesuaian kompetensi pegawai dengan bidang pekerjaannya. Lingkup peningkatan kompetensi pegawai salah satunya adalah melalui pelatihan yang diselenggarakan di BPPK maupun di luar BPPK, meliputi seminar, sosialisasi, *internship/on the job training*, *basic training* (DTSD), *workshop*, bimbingan teknis dan *sharing session*. Bimbingan teknis dan *sharing session* harus melibatkan narasumber eksternal satker penyelenggara. Perbandingan antara target dan realisasi pemenuhan standar *hard competency* beberapa tahun terakhir untuk KPKNL Padang antara lain:

TABEL 15

<i>Hard Competency</i>	2016	2017	2018	2019	2020
Target	89%	90	91	87	100
Realisasi	90,91%	93,10	100	100	100

Sasaran Strategis 11: Organisasi yang *fit for purpose***Dengan Indikator Kinerja Utama:****a. Nilai Pemenuhan Unit Kerja terhadap kriteria ZI menuju WBBM**

Setelah tahun 2018 meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari Menpan-RB, di tahun 2020 KPKNL Padang berkesempatan untuk mengikuti kompetensi Unit Kerja terhadap kriteria Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Birokrasi dan Melayani (WBBM), namun dalam tahapan seleksi KPKNL Padang belum dapat memenuhi syarat ambang batas sebagai unit kerja berpredikat WBBM. Dari target 85, KPKNL Padang hanya meraih 82.

b. Nilai hasil review pengelolaan kinerja berbasis BSC

Kartu Skor Berimbang (bahasa Inggris: *Balanced Scorecard*, BSC) adalah suatu alat manajemen strategis yang menerjemahkan Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi ke dalam kerangka operasional. BSC merupakan alat yang dipakai dalam pengelolaan kinerja di Kementerian Keuangan.

Pengelolaan kinerja berbasis BSC di Kementerian Keuangan dibagi ke dalam 6 level, yaitu:

- a. Kemenkeu-Wide : level Kementerian (Komitmen Kinerja Menteri dan Kontrak Kinerja Wakil Menteri);
- b. Kemenkeu-One : level Unit Eselon I (Kontrak Kinerja Pejabat Struktural Eselon I);
- c. Kemenkeu-Two : level Unit Eselon II (Kontrak Kinerja Pejabat Struktural Eselon II);
- d. Kemenkeu-Three : level Unit Eselon III (Kontrak Kinerja Pejabat Struktural Eselon III);
- e. Kemenkeu-Four : level Unit Eselon IV (Kontrak Kinerja Pejabat Struktural Eselon IV); dan
- f. Kemenkeu-Five : Kontrak Kinerja Staf Ahli Menteri, Tenaga Pengkaji, Pejabat Fungsional, level unit Eselon V dan Pelaksana.

Hasil review yang diraih oleh KPKNL Padang pada tahun 2020 adalah 85 dari target awal yang diberikan adalah 75.

TABEL 16

Survei	2016	2017	2018	2019	2020
Target	70	100	70	75	75
Realisasi	80	100	90,41	92,40	85

c. Indeks efektivitas penyelenggaraan FGD Kode Etik Pegawai

Pada bulan Mei 2020, KPKNL Padang menyelenggarakan Sosialisasi Kode Etik Dan Perilaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dihadiri oleh seluruh pegawai KPKNL Padang. Kegiatan FGD ini menjadi suatu kegiatan rutin yang diadakan oleh Seksi Kepatuhan Internal KPKNL Padang. Keefektifitasan penyelenggaraan FGD tersebut mendapatkan indeks 97,96 dari target 80.

Sasaran Strategis 12: Pengelolaan BMN dan keuangan yang optimal

Dengan Indeks Kinerja Utama:

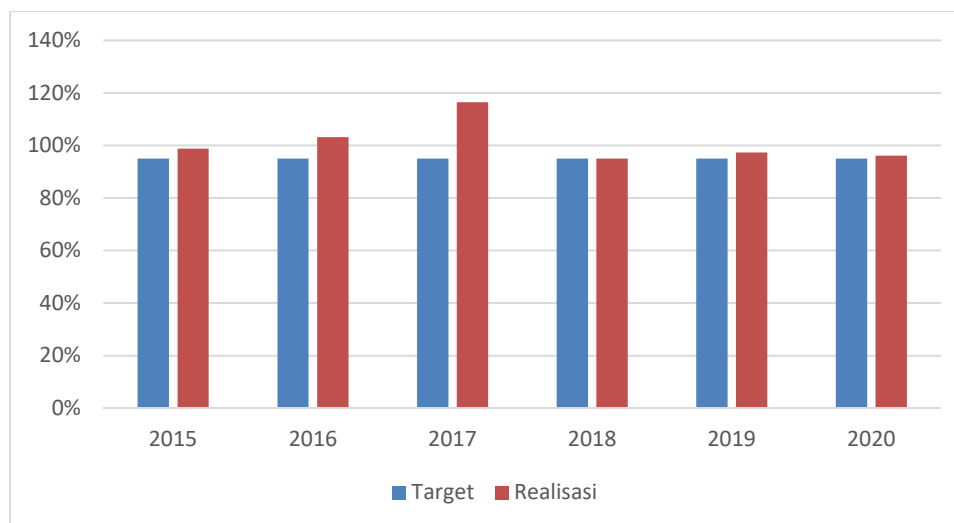
Persentase kualitas pengelolaan Anggaran

Realisasi penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja untuk tahun 2020 sebesar 96,06% sesuai dengan target yang ditetapkan. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja beberapa tahun terakhir untuk KPKNL Padang antara lain:

TABEL 17

Anggaran	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Target	95%	95%	95%	95%	95%	95%
Realisasi	98,73%	103,21%	116,49%	95%	97,29%	96,06%

GRAFIK 8



KINERJA LAINNYA

Selain dari 12 (dua belas) IKU yang ditetapkan oleh DJKN dengan capaian sebagaimana diuraikan di atas, KPKNL Padang juga telah melakukan kegiatan/partisipasi yang tak kalah pentingnya terkait dengan tugas dan fungsi KPKNL Padang. Kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Aset Lain-lain

Pengelolaan Barang Milik Negara yang berasal dari Aset Lain-lain dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.06/2013, antara lain terhadap barang yang diperoleh dari pelaksanaan perjanjian kerja sama antara Pemerintah Republik Indonesia dengan badan internasional dan/atau Negara asing serta barang yang diperoleh dari pembubaran badan yang dibentuk Kementerian/Lembaga.

2. Pengumpulan dokumen untuk mendukung pemetaan asset eks. BPPN

Melakukan inventarisasi dan verifikasi dokumen kredit dan dokumen pendukung lainnya terhadap asset kredit eks BPPN dan eks BDL di wilayah kerja KPKNL Padang.

3. Pelaksanaan *Quality Assurance* Pejabat Lelang Kelas I

KPKNL Padang dan Kanwil DJKN Riau, Sumatera Barat dan Kepulauan Riau mengadakan *Quality Assurance* Pejabat Lelang Kelas I pada Tahun Anggaran 2020. Pejabat Lelang Kelas I KPKNL Padang ikut serta dalam delayering/inpassing untuk pejabat fungsional Pelelang.

4. Pelaksanaan *Focus Group Discussion*

KPKNL Padang dan Kanwil DJKN Riau, Sumatera Barat dan Kepulauan Riau mengadakan *Focus Group Discussion* pada Tahun Anggaran 2020. KPKNL Padang ikut serta dan menginisiasi kegiatan tersebut. Diantaranya adalah :

1. Focus Group Discussion (FGD) : Kebijakan Keuangan Negara dan Kebijakan Sektor Keuangan sebagai Crisis Relief dalam Menangani Pandemi Covid-19 pada 15 Juni 2020
2. Bincang Transformasi: Transformasi Digital bukan Pilihan, tapi Keharusan pada 12 Agustus 2020
3. Focus Group Discussion (FGD) : Evaluasi Kinerja Lelang Hak Tanggungan Semester 1 2020 Dan Strategi Semester 2 2020 Pada 16 September 2020
4. 1. FGD Pejabat Administrator: Kebijakan Defisit Anggaran Pemerintah pada 28 September 2020

5. Revaluasi kembali atau Penilaian Ulang BMN tahun 2020

Pelaksanaan penilaian ulang pada satuan kerja KPKNL Padang ini menandakan *kick-off* atau langkah awal dimulainya Revaluasi BMN di wilayah kerja KPKNL Padang pada tahun 2018. Pada tahun 2020 KPKNL Padang menindaklanjuti revaluasi yang telah dilakukan pada tahun 2018. Revaluasi atau Penilaian Ulang BMN yang dilakukan pada BMN berupa tanah, bangunan, dan jalan, irigasi, serta bangunan air. Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh nilai aset tetap yang terkini. Ke depannya, nilai ini akan dicantumkan pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

5. Bimbingan Teknis KPKNL Padang

Dilatarbelakangi semangat menyukseskan Revaluasi Barang Milik Negara (BMN) Tahun 2020, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padang menggelar kegiatan Bimbingan Teknis kepada perwakilan satuan kerja di wilayah kerja KPKNL Padang baik terkait permohonan dan pelaksanaan lelang, tindaklanjut revaluasi temuan BPK maupun piutang negara. Dikarenakan bencana nasional non alam Covid-

19 di tahun 2020, bimbingan teknis dilakukan secara *daring* melalui aplikasi zoom meeting. Salah satu kegiatan yang telah dilakukan adalah *Webinar Session* : *Peningkatan status Revaluasi BMN ke Tahap BAR IP Selesai*.

ANALISIS ATAS PELAKSANAAN RENCANA AKSI ATAU MITIGASI RISIKO

Pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja selama di tahun 2020 dianalisis dalam rapat dialog kinerja organisasi KPKNL Padang periode triwulan IV tahun 2020. Dalam rapat DKO tersebut, disampaikan revaluasi pencapaian kinerja dengan nilai kinerja organisasi KPKNL Padang pada tahun 2020 adalah 103,40. Namun terdapat 1 (satu) buah IKU yang capaiannya merah yaitu Persentase Hasil lelang. Pemenuhan target persentase hasil lelang yang tidak optimal dari target yang disebabkan tingginya target Hasil Lelang Pegadaian yang dihitung sebagai capaian kinerja KPKNL Padang.

RENCANA AKSI ATAU MITIGASI RISIKO UNTUK TAHUN 2021

Memasuki tahun 2021 ini, KPKNL Padang bersiap membenahi organisasi dan menjalankan rencana aksi yang telah ditetapkan demi meningkatkan kinerja organisasi KPKNL Padang. Berikut mitigasi risiko dan rencana aksi yang akan dilakukan KPKNL Padang pada tahun 2021 :

1. IKU Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang bersumber dari PNBP lelang, PNBP Piutang, dan PNBP Aset. Rencana aksi yang akan dilakukan pada tahun 2020, antara lain:
 - Sosialisasi pengelolaan Barang Milik Negara dengan Kementerian/Lembaga terkait
 - Koordinasi ke Satuan Kerja wilayah kerja di KPKNL Padang
 - Untuk PNBP piutang, dilakukan penelitian lapangan langsung terhadap debitur atau penjamin hutang.
2. IKU Sertifikasi BMN, rencana aksi:
 - Koordinasi dengan Kantor Pertanahan dan Kanwil ATR/BPN beserta satker terkait.
 - Menggelar *forum group discussion* secara berkala bersama dan kantor pertanahan dan satuan kerja dibawahnya
3. IKU Persentase Hasil Lelang, rencana aksi :
 - Penggalan potensi lelang dan membuat daftar potensi laku tahun 2021
 - Meningkatkan koordinasi dengan pemohon lelang terutama lelang eksekusi hak tanggungan Perbankan
 - Koordinasi dengan PT.Pegadaian setempat
 - Sosialisasi dengan masyarakat terkait lelang

REALISASI ANGGARAN**Pengukuran Capaian Output Belanja dan Penyerapan Anggaran KPKNL Padang**

Pada tahun 2020, KPKNL Padang mendapatkan alokasi anggaran belanja pegawai setelah revisi sebesar Rp.3.304.975.000. Dan hingga akhir 2020, jumlah realisasi sebesar Rp2.616.277.615 dan total anggaran yang tersedia telah diserap sebesar 96,06%.

**PERHITUNGAN HASIL EFISIENSI
KPKNL PADANG
BULAN DESEMBER TAHUN ANGGARAN 2020**

N O	OUTPUT/OBJEK EFISIENSI	AKUN	TRIWULAN IV			
			% CAPAIAN KELUARAN RIIL	PAGU AKHIR (Rp)	REALISASI S.D. TRIWULAN IV (Rp)	HASIL EFISIENSI (Rp)
001	Surat Persetujuan/Penolakan atas Permohonan Pengelolaan BMN		232,20			
	a. Perjalanan Dinas	524111, 524113		Rp 289.684.000	Rp 179.588.175	Rp 110.095.825
	b. Konsinyering/Paket Meeting	524114, 524119				
	c. Kudapan dan Makan Siang Rapat	521211		Rp 24.583.000	Rp 7.323.600	Rp 17.259.400
	d. Pengadaan Barang dan Jasa	521811				
	e. Belanja Lainnya	521219, 522141				
002	Rekomendasi BMN Berupa Tanah yang Disertipikatkan		407,26			
	a. Perjalanan Dinas	524111, 524113		Rp 17.622.000	Rp 15.907.626	Rp 1.714.374
	b. Konsinyering/Paket Meeting	524114, 524119				
	c. Kudapan dan Makan Siang Rapat	521211		Rp 3.550.000	Rp 3.109.000	Rp 441.000
	d. Pengadaan Barang dan Jasa	521811				
	e. Belanja Lainnya	521219, 522141				
003	Pengawasan dan Pengendalian BMN		100			

LAPORAN KINERJA KPKNL PADANG TAHUN 2020

	a. Perjalanan Dinas	524111, 524113		Rp 3.326.000	Rp 1.800.000	Rp 1.526.000
	b. Konsinyering/Paket Meeting	524114, 524119				
	c. Kudapan dan Makan Siang Rapat	521211		Rp 5.120.000	Rp -	Rp 5.120.000
	d. Pengadaan Barang dan Jasa	521811				
	e. Belanja Lainnya	521219, 522141				
00 4	Kajian Portofolio Aset		100			
	a. Perjalanan Dinas	524111, 524113		Rp 21.180.000	Rp 7.300.000	Rp 13.880.000
	b. Konsinyering/Paket Meeting	524114, 524119				
	c. Kudapan dan Makan Siang Rapat	521211		Rp 3.050.000	Rp -	Rp 3.050.000
	d. Pengadaan Barang dan Jasa	521811				
	e. Belanja Lainnya	521219, 522141				
00 5	Dokumen Pengurusan Piutang Negara		104			
	a. Perjalanan Dinas	524111, 524113		Rp 22.907.000	Rp 21.442.400	Rp 1.464.600
	b. Konsinyering/Paket Meeting	524114, 524119				
	c. Kudapan dan Makan Siang Rapat	521211		Rp 5.922.000	Rp 1.700.900	Rp 4.221.100
	d. Pengadaan Barang dan Jasa	521811				
	e. Belanja Lainnya	521219, 522141				
00 6	Risalah Lelang		430,93			
	a. Perjalanan Dinas	524111, 524113		Rp 26.154.000	Rp 25.925.000	Rp 229.000
	b. Konsinyering/Paket Meeting	524114, 524119				
	c. Kudapan dan Makan Siang Rapat	521211		Rp 8.381.000	Rp 880.000	Rp 7.501.000
	d. Pengadaan Barang dan Jasa	521811				
	e. Belanja Lainnya	521219, 522141				
97 0	Layanan Dukungan Manajemen Satker		100			

LAPORAN KINERJA KPKNL PADANG TAHUN 2020

	a. Perjalanan Dinas	524111, 524113		Rp 26.942.000	Rp 25.925.000	Rp 1.017.000
	b. Konsinyering/Paket Meeting	524114, 524119				
	c. Kudapan dan Makan Siang Rapat	521211		Rp 1.856.000	Rp 1.500.000	Rp 356.000
	d. Pengadaan Barang dan Jasa	521811				
	e. Belanja Lainnya	521219, 522141		Rp 200.000	Rp 40.000	Rp 160.000
99 4	Layanan Perkantoran		100			
	a. Perjalanan Dinas	524111, 524113		Rp 52.708.000	Rp 48.231.213	Rp 4.476.787
	b. Konsinyering/Paket Meeting	524114, 524119				
	c. Kudapan dan Makan Siang Rapat	521211				
	d. Langganan Daya dan Jasa	Seluruh Akun pada subkomponen langganan daya dan jasa		Rp 202.500.000	Rp 175.185.248	Rp 27.314.752
	e. Honorarium Tim dan Narasumber	522151				
	f. Pengadaan Barang dan Jasa	521811		Rp 89.590.000	Rp 88.327.000	Rp 1.263.000
	g. Belanja Operasional Perkantoran	521111, 521112, 521113, 521114, 521119 (di luar Subkomponen langganan Daya dan Jasa)		Rp 761.379.000	Rp 746.098.978	Rp 15.280.022
	h. Belanja Jasa	522191				
	i. Belanja Pemeliharaan	Seluruh Akun pada Subkomponen Pemeliharaan Kantor		Rp 411.530.000	Rp 385.690.368	Rp 25.839.632

**PENYERAPAN ANGGARAN ATAS PAGU NETO
KPKNL PADANG
BULAN DESEMBER TAHUN ANGGARAN 2020**

Uraian	Pagu Akhir (Rp)	Realisasi s.d. Triwulan IV (Rp)	%
-1	-2	-3	-4
Pagu Bruto	Rp 3.304.975.000	Rp 2.941.716.047	89,01%
Faktor Pengurang			
a. Belanja Pegawai	Rp 1.247.758.000	Rp 1.126.522.077	
b. <i>Self Blocking</i>	-		
c. Hasil Efisiensi		Rp 363.258.953	
d. Dana Khusus	-	-	
Penyerapan Anggaran Neto	Rp 1.693.958.047	Rp 1.451.935.017	85,71%
Trajectory Penyerapan Anggaran Neto Triwulan IV			95%
Capaian Indikator Penyerapan Anggaran Neto Triwulan IV			94%

BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIN) KPKNL Padang Tahun 2020 merupakan suatu bentuk akuntabilitas dan transparansi terhadap pelaksanaan kinerja KPKNL Padang dalam Tahun Anggaran 2019 yang disusun untuk memenuhi asas *good governance* serta mewujudkan suatu penyelenggaraan negara yang bebas KKN dimana setiap penyelenggara layanan publik wajib menyusun suatu laporan kinerja.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Padang (KPKNL) Padang merupakan organisasi yang memiliki tugas dan fungsi pengelolaan kekayaan negara yang meliputi barang milik negara, piutang negara, kekayaan negara lain-lain, supervise atas pelaksanaan lelang dan lain sebagainya. Dengan terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 77/PUU-IX/2012 yang menyatakan bahwa PUPN tidak berwenang lagi menagih piutang BUMN karena pengelolaan harta dan kekayaan BUMN harus didasarkan pada praktik korporasi yang sehat sesuai UU Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, terjadi pengurangan yang cukup signifikan dalam luas lingkup tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan KPKNL Padang yang berkaitan dengan penagihan piutang yang berasal dari Bank BUMN.

Bermodalkan prestasi sebagai unit kerja pelayanan berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi pada tahun 2018, KPKNL Padang terus meningkatkan dan mengembangkan diri menjadi unit pelayanan menuju Wilayah Bebas Bersih Melayani di tahun mendatang. Berbagai permasalahan yang dihadapi menjadi pembelajaran yang berharga bagi seluruh jajaran Direktorat Jenderal Kekayaan Negara khususnya KPKNL Padang. Capaian kinerja yang telah diraih pada akhir tahun 2020, hambatan eksternal maupun internal diharapkan mampu meningkatkan kapabilitas pegawai KPKNL Padang sehingga nantinya dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal.

Kami berharap penyusunan LAKIN KPKNL Padang Tahun 2020 ini dapat memberikan penjelasan secara mendalam kepada *stakeholder* terkait tugas dan fungsi KPKNL Padang. Kami menyambut baik setiap *feedback* dari semua pihak sehingga dapat secara proaktif ikut membangun pelayanan publik yang menerapkan asas *good governance* dan bebas KKN.

LAMPIRAN

FORMULIR PENGUKURAN KINERJA

Unit Organisasi : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Padang
Tahun Anggaran : 2020

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Awal 2020	Target Addendum	Realisasi	%	
1.	Pengelolaan kekayaan negara yang optimal	1a-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang				
			a. PNBP Pengelolaan BMN	Rp10.937.586.081	Rp6.596.864.848	Rp10.169.996.710	154%
			b. PNBP Piutang Negara	Rp19.996.270	Rp15.997.016	Rp8.425.445	53%
		c. PNBP Lelang	Rp3.040.000.000	Rp3.040.000.000	Rp2.045.490.144	67%	
		1b-CP	Tingkat <i>outstanding</i> piutang negara	Rp645.757.869		Rp767.579.741	119%
		1c-N	Persentase pengukuran tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK	100%		100%	100%
2.	Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien	2a-CP	Indeks kepuasan pengguna layanan KPKNL	4,4 (skala 5)		4,85 (skala 5)	110%
3.	Pengelolaan lelang yang optimal	3a-CP	Persentase hasil lelang (Pokok Lelang)				
			a. Pokok Lelang Kelas I	Rp53.000.000.000		Rp29.194.836.581	55%
			b. Pokok Lelang Pegadaian	Rp46.650.000.000		Rp20.125.172.800	43%
4.	Manajemen pelayanan yang berkualitas	4a-CP	Rata-rata indeks ketepatan waktu penyelesaian layanan kekayaan negara dan lelang	90 (skala 100)		98,39 (skala 100)	109%
5.	Tata kelola kekayaan negara yang efektif	5a-CP	Persentase bidang tanah BMN yang disertipikatkan	100%		120%	120%
		5b-CP	Persentase efektivitas penyelesaian BKP	100%		120%	120%
		5c-CP	Persentase nilai kekayaan negara yang diutilisasi	Rp8.994.933.000.000		Rp9.918.426.932.291	110%
		5d-CP	Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%		100%	100%
6.	Penilaian yang berkualitas	6a-CP	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	30%		120%	25%
7.	Tata kelola lelang yang efektif	7a-CP	Persentase produktivitas lelang	34%		120%	28%
		7b-CP	Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction	90%		111%	81%
8.	Edukasi yang efektif	8a-N	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	90		92,5	103%
9.	Pengawasan dan pengendalian yang efektif	9a-CP	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan aset	80%		120%	150%
		9c-CP	Persentase tindak lanjut penyelesaian/perbaikan atas sisa aset objek penilaian kembali BMN	100%		100%	100%
10.	SDM yang kompeten	10a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%		120%	120%
11.	Organisasi yang <i>fit for purpose</i>	11a-N	Nilai Pemenuhan Unit Kerja terhadap kriteria ZI menuju WBBM	85 (skala 100)		82,09 (skala 100)	97%
		11b-N	Nilai hasil <i>review</i> pengelolaan kinerja berbasis BSC	70 (skala 100)		70 (skala 100)	100%
		11c-N	indeks efektivitas penyelenggaraan FGD Kode Etik Pegawai	80 (skala 100)		97,96 (skala 100)	122%
12.	Pengelolaan BMN dan keuangan yang optimal	12a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95%		96%	101%

Jumlah Anggaran Program Tahun 2020 : Rp3.304.975.000

Jumlah Realisasi Anggaran Program Tahun 2020 : Rp2.935.618.713

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-padang>